



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendidikan Nilai dan Kewarganegaraan dalam Ekosistem Sosial Hibrida: Analisis Peran Masyarakat Riil dan Maya

Ilyas Maulana¹, Marzuki², Annisa Istiqomah³

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, ilyas40fisip.2025@student.uny.ac.id

²Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, marzuki@uny.ac.id

³Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, anisa.istiqomah@uny.ac.id

Corresponding Author: ilyas40fisip.2025@student.uny.ac.id¹

Abstract: *The Study analyzes value education and citizenship education in a hybrid social ecosystem by examining the complementary roles of real communities and virtual communities. The study is motivated by the expansion of digital interaction that has changed how values are learned, negotiated, and practiced by citizens. This research used an integrative literature review by synthesizing books, journal articles, official reports, and relevant conceptual works on value education, citizenship education, digital citizenship, civic participation, and social media. The findings show that real communities remain essential as spaces for habituation, role modeling, social control, empathy, and direct civic participation. Virtual communities expand citizenship learning through access to information, dialogic participation, digital campaigns, collaborative networks, and public deliberation. However, digital spaces also produce risks such as misinformation, polarization, hate speech, shallow participation, and weakening ethical responsibility. Therefore, value education and citizenship education need a hybrid model that connects family, school, community, and digital platforms through reflective learning, community-based projects, media literacy, digital ethics, and civic action. This article concludes that the synergy between real and virtual communities can strengthen the formation of morally responsible, critical, participatory, and digitally literate citizens.*

Keywords: *Value Education, Citizenship Education, Hybrid Social Ecosystem, Virtual Community, Digital Citizenship*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam ekosistem sosial hibrida melalui telaah peran masyarakat riil dan masyarakat maya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya interaksi digital yang mengubah cara nilai dipelajari, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka integratif dengan mensintesis buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan karya konseptual yang relevan mengenai pendidikan nilai, Pendidikan Kewarganegaraan, kewarganegaraan digital, partisipasi warga, dan media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat riil tetap berperan penting sebagai ruang pembiasaan, keteladanan, kontrol sosial, empati, dan partisipasi kewargaan langsung. Masyarakat maya memperluas pembelajaran kewarganegaraan melalui akses informasi, partisipasi dialogis, kampanye digital, jejaring

kolaboratif, dan deliberasi publik. Namun, ruang digital juga menghadirkan risiko disinformasi, polarisasi, ujaran kebencian, partisipasi dangkal, dan pelemahan tanggung jawab etik. Pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan melalui model hibrida yang menghubungkan keluarga, sekolah, komunitas, dan platform digital melalui pembelajaran reflektif, proyek berbasis masyarakat, literasi media, etika digital, dan aksi kewargaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sinergi masyarakat riil dan maya dapat memperkuat pembentukan warga negara yang bermoral, kritis, partisipatif, bertanggung jawab, dan literasi digital.

Kata Kunci: Pendidikan Nilai, Pendidikan Kewarganegaraan, Ekosistem Sosial Hibrida, Masyarakat Maya, Warga Negara Digital

PENDAHULUAN

Perubahan sosial pada abad ke-21 berlangsung dalam situasi ketika kehidupan warga negara tidak lagi hanya dibentuk oleh hubungan tatap muka di keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga oleh interaksi yang terus-menerus di ruang digital. Perkembangan internet, media sosial, aplikasi percakapan, dan platform berbagi konten telah memperluas ruang belajar nilai sekaligus menggeser pola komunikasi warga dari komunitas yang sepenuhnya lokal menuju komunitas yang saling terhubung secara lintas ruang. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai urusan sekolah, melainkan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam ekosistem sosial hibrida, yaitu keterhubungan antara masyarakat riil dan masyarakat maya dalam membentuk kesadaran, sikap, dan praktik kewargaan (Castells, 2010; Choi, 2016; Loader et al., 2014).

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Survei APJII mencatat jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5% (APJII, 2024). DataReportal juga melaporkan bahwa Indonesia memiliki 180 juta identitas pengguna media sosial aktif pada Oktober 2025, setara dengan 62,9% populasi pada akhir 2025 (Kepios, 2026). Di sisi lain, Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat kecakapan, budaya, keamanan, dan etika digital masyarakat (BPSDM Komdigi, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa pembelajaran nilai tidak hanya terjadi melalui buku ajar dan ruang kelas, tetapi juga melalui percakapan daring, unggahan media sosial, budaya komentar, jejaring komunitas, serta praktik partisipasi digital sehari-hari.

Pendidikan nilai merupakan proses sadar untuk membantu peserta didik mengenali, memahami, menghayati, memilih, dan mempraktikkan nilai dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Pendidikan nilai tidak cukup berhenti pada pengetahuan normatif tentang baik dan buruk, tetapi perlu hadir dalam pembiasaan, keteladanan, dialog moral, refleksi, dan pengalaman sosial yang bermakna (Althof & Berkowitz, 2006; Fraenkel, 1977; Lickona, 1991; Zuchdi et al., 2012). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan nilai berfungsi membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban, memiliki kepedulian sosial, menghargai keberagaman, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta bertindak sesuai prinsip demokrasi dan Pancasila (Banks, 2008; Budimansyah, 2010; Sapriya, 2012; Winataputra, 2015).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi yang lebih luas daripada penyampaian pengetahuan konstitusional. Pendidikan Kewarganegaraan berupaya membentuk kompetensi kewargaan yang mencakup pengetahuan kewargaan, keterampilan kewargaan, dan watak kewargaan. Orientasi tersebut selaras dengan gagasan warga negara yang baik sebagai pribadi yang bertanggung jawab secara moral, mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama, serta

memiliki kepekaan terhadap keadilan sosial (Westheimer & Kahne, 2004). Dalam situasi digital, warga negara yang baik juga perlu memiliki literasi media, etika komunikasi, kemampuan memverifikasi informasi, kesadaran privasi, dan tanggung jawab terhadap jejak digital (Choi et al., 2017; Jones & Mitchell, 2016; Ribble, 2015).

Permasalahan utama yang muncul ialah adanya kesenjangan antara perluasan ruang interaksi digital dengan kesiapan pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membimbing peserta didik serta masyarakat untuk hidup secara etis di dua ruang sekaligus. Masyarakat riil menyediakan pengalaman konkret melalui interaksi langsung, gotong royong, musyawarah, tradisi lokal, kegiatan sosial, dan kontrol sosial yang relatif dekat. Masyarakat maya menyediakan akses informasi cepat, ruang dialog luas, jejaring partisipasi, dan peluang advokasi publik, tetapi juga membawa tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber, polarisasi identitas, serta budaya komunikasi yang sering kali reaktif (Kahne et al., 2012; Mihailidis & Thevenin, 2013; Ohler, 2011; Vromen et al., 2015).

Kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan selama ini banyak membahas peran sekolah, kurikulum, guru, buku ajar, dan pembelajaran karakter. Kajian kewarganegaraan digital juga berkembang dengan menekankan literasi digital, keamanan digital, partisipasi daring, dan etika digital. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan masyarakat riil dan masyarakat maya sebagai satu ekosistem sosial hibrida dalam pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan masih perlu diperkuat. Padahal, peserta didik dan warga negara saat ini hidup dalam mobilitas nilai yang terus berpindah antara rumah, sekolah, komunitas lokal, media sosial, ruang komentar, permainan daring, dan komunitas digital. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis peran masyarakat riil dan masyarakat maya dalam mendukung pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan serta merumuskan model konseptual integrasi keduanya dalam pembentukan warga negara yang berkarakter dan literat digital.

Pertanyaan utama artikel ini adalah bagaimana peran masyarakat riil dan masyarakat maya dalam mendukung pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan pada ekosistem sosial hibrida. Pertanyaan tersebut dijabarkan ke dalam tiga fokus pembahasan, yaitu bagaimana masyarakat riil berfungsi sebagai ruang pembiasaan dan praktik nilai kewargaan, bagaimana masyarakat maya berfungsi sebagai ruang partisipasi dan pembelajaran kewargaan digital, serta bagaimana sinergi keduanya dapat dirancang sebagai model penguatan Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan warga negara abad ke-21.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka integratif. Metode ini dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menyusun sintesis konseptual mengenai pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam ekosistem sosial hibrida. Kajian pustaka integratif memungkinkan penulis menggabungkan temuan empiris, teori, laporan resmi, dan gagasan konseptual untuk membangun pemahaman baru mengenai relasi masyarakat riil, masyarakat maya, dan pembentukan karakter kewargaan (Snyder, 2019; Torraco, 2016).

Sumber data kajian terdiri atas buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi, serta sumber konseptual yang relevan dengan pendidikan nilai, Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan karakter, kewarganegaraan digital, literasi media, dan partisipasi sosial. Kriteria pemilihan sumber meliputi kesesuaian dengan tema, reputasi akademik, keterbaruan untuk data digital, serta relevansi terhadap konteks Indonesia. Laporan APJII, DataReportal, dan BPSDM Komdigi digunakan untuk memperkuat konteks perkembangan masyarakat digital Indonesia, sedangkan artikel jurnal dan buku akademik digunakan untuk membangun dasar teoretis dan analisis konseptual.

Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sumber dengan kata kunci pendidikan nilai, Pendidikan Kewarganegaraan, civic education, digital citizenship, media literacy, civic participation, dan hybrid social ecosystem. Tahap kedua adalah klasifikasi sumber berdasarkan fokus kajian, yaitu pendidikan nilai, kewarganegaraan, masyarakat riil, masyarakat maya, dan integrasi sosial hibrida. Tahap ketiga adalah sintesis tematik untuk menemukan pola peran, tantangan, dan strategi. Tahap keempat adalah perumusan model konseptual integrasi masyarakat riil dan maya sebagai basis penguatan Pendidikan Kewarganegaraan. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, konsistensi argumentasi, dan keterkaitan antara data, teori, serta rekomendasi konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam ekosistem sosial hibrida membutuhkan pemahaman yang melampaui dikotomi antara dunia nyata dan dunia maya. Masyarakat riil dan masyarakat maya tidak berdiri sebagai dua ruang yang terpisah secara mutlak, tetapi saling memengaruhi dalam pembentukan cara berpikir, sikap, pilihan moral, dan tindakan kewargaan. Nilai yang dipelajari melalui keluarga, sekolah, dan komunitas dapat diperkuat atau dilemahkan oleh percakapan digital. Sebaliknya, nilai yang diperoleh dari ruang digital dapat diuji, dibiasakan, atau dikoreksi melalui interaksi sosial langsung.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Relevan tentang Pendidikan Nilai, Kewarganegaraan, dan Ruang Digital

Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Artikel
Pendidikan nilai dan karakter	Nilai efektif dibentuk melalui pengetahuan moral, perasaan moral, tindakan moral, pembiasaan, dan keteladanan.	Menegaskan bahwa masyarakat riil penting sebagai ruang habituasi nilai.
Pendidikan Kewarganegaraan	Warga negara yang baik mencakup tanggung jawab pribadi, partisipasi, dan orientasi keadilan sosial.	Menjadi dasar untuk menilai kualitas partisipasi warga di ruang riil dan digital.
Kewarganegaraan digital	Kewarganegaraan digital mencakup etika digital, literasi informasi, partisipasi daring, keamanan, dan tanggung jawab sosial.	Menjelaskan fungsi masyarakat maya sebagai ruang belajar kewargaan baru.
Literasi media dan partisipasi	Literasi media berkorelasi dengan keterlibatan politik dan partisipasi warga secara daring.	Memperkuat argumentasi bahwa pendidikan nilai perlu memasukkan verifikasi informasi dan dialog digital.
Masyarakat jaringan	Teknologi digital membentuk pola relasi sosial yang cair, cepat, dan lintas ruang.	Mendasari konsep ekosistem sosial hibrida sebagai ruang pendidikan kewargaan.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Ekosistem Sosial Hibrida sebagai Ruang Pendidikan Nilai

Ekosistem sosial hibrida dapat dipahami sebagai ruang kehidupan warga yang mempertemukan hubungan sosial langsung dengan hubungan sosial berbasis teknologi digital. Dalam ekosistem ini, warga tidak hanya belajar dari keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, tetapi juga dari algoritma media sosial, figur publik digital, komunitas daring, forum percakapan, konten video pendek, serta narasi yang beredar di platform digital. Masyarakat jaringan membuat komunikasi sosial berlangsung secara cepat, terbuka, dan sering kali melampaui batas institusi formal (Castells, 2010).

Karakter hibrida kehidupan sosial menghadirkan konsekuensi penting bagi pendidikan nilai. Nilai tidak lagi hanya diwariskan secara vertikal dari orang tua, guru, atau tokoh

masyarakat kepada peserta didik, tetapi juga dinegosiasikan secara horizontal melalui pergaulan sebaya, komunitas digital, dan budaya partisipatif. Peserta didik dapat memperoleh nilai solidaritas dari kegiatan bakti sosial di lingkungan sekolah, tetapi pada saat yang sama dapat mempelajari cara berpendapat, berdebat, atau merespons isu publik melalui media sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa pembentukan nilai berlangsung secara simultan melalui pengalaman riil dan pengalaman digital (Jenkins et al., 2006; Mihailidis & Thevenin, 2013).

Ekosistem sosial hibrida juga mengubah otoritas pendidikan. Guru dan sekolah tetap menjadi aktor penting, tetapi bukan satu-satunya sumber nilai. Orang tua, komunitas lokal, tokoh agama, organisasi kepemudaan, media, pembuat konten, influencer, dan komunitas digital ikut memengaruhi cara peserta didik memahami nilai. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan sebagai pendidikan sosial yang menghubungkan ruang kelas dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan yang kuat tidak hanya menjelaskan konsep demokrasi, hak, kewajiban, dan konstitusi, tetapi juga melatih peserta didik membaca persoalan publik, berdialog dengan etis, mengambil keputusan moral, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang riil dan digital (Banks, 2008; Haste, 2004; Westheimer & Kahne, 2004).

Peran Masyarakat Riil dalam Pendidikan Nilai dan Kewarganegaraan

Masyarakat riil memiliki fungsi utama sebagai ruang pembiasaan nilai. Keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, organisasi masyarakat, tempat ibadah, karang taruna, komunitas seni, komunitas olahraga, dan kelompok relawan menyediakan pengalaman langsung tentang tanggung jawab, disiplin, kerja sama, gotong royong, kepedulian, toleransi, dan kepemimpinan. Nilai yang dipelajari secara konseptual dalam Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh makna ketika peserta didik melihat contoh konkret, mengalami konsekuensi sosial, dan ikut terlibat dalam kegiatan bersama (Lickona, 1991; Sapriya, 2012; Zuchdi et al., 2012).

Keluarga menjadi ruang pertama pendidikan nilai karena anak mengenal tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, empati, dan kepedulian melalui relasi sehari-hari. Pola komunikasi keluarga menentukan cara anak menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan konflik. Sekolah kemudian memperluas proses tersebut melalui pembelajaran, tata tertib, budaya sekolah, organisasi siswa, proyek sosial, dan interaksi dengan guru maupun teman sebaya. Komunitas lokal memperkuatnya melalui kegiatan gotong royong, musyawarah warga, peringatan hari besar, kerja bakti, kepedulian terhadap tetangga, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (Budimansyah, 2010; Komalasari & Saripudin, 2018; Winarno, 2013).

Masyarakat riil juga menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam hubungan sosial langsung, perilaku warga memperoleh respons dari lingkungan. Apresiasi, teguran, nasihat, dan musyawarah menjadi mekanisme pembelajaran moral yang membantu individu memahami batas antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial. Fungsi ini penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan karena demokrasi membutuhkan warga yang tidak hanya memahami hak, tetapi juga sadar akan kewajiban dan dampak tindakannya terhadap orang lain. Warga negara yang baik bukan sekadar taat aturan, melainkan mampu mempraktikkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap keadilan bersama (Hoskins & Mascherini, 2009; Westheimer & Kahne, 2004).

Peran lain masyarakat riil adalah menyediakan pengalaman kewargaan langsung. Peserta didik dapat belajar demokrasi melalui pemilihan ketua kelas, musyawarah organisasi, forum siswa, diskusi komunitas, dan aksi sosial. Mereka belajar nilai persatuan melalui kegiatan lintas kelompok, nilai kemanusiaan melalui kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, nilai keadilan melalui pembagian tugas yang seimbang, dan nilai tanggung jawab melalui penyelesaian proyek bersama. Pengalaman semacam ini membuat Pendidikan

Kewarganegaraan tidak berhenti pada hafalan konsep, tetapi menjadi praktik hidup sehari-hari (Dewey, 1916; Torney-Purta, 2002).

Peran Masyarakat Maya dalam Kewarganegaraan Digital

Masyarakat maya memperluas ruang pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan karena warga dapat berinteraksi, belajar, berdiskusi, dan berpartisipasi melalui platform digital. Media sosial memungkinkan peserta didik memperoleh informasi tentang isu publik, mengikuti kampanye sosial, berdiskusi tentang kebijakan, menyuarakan aspirasi, dan terlibat dalam aksi solidaritas. Dalam konteks ini, masyarakat maya dapat menjadi ruang pembelajaran kewarganegaraan digital yang mengembangkan kesadaran hak, tanggung jawab, partisipasi, dan keberagaman (Bennett, 2008; Choi, 2016; Loader et al., 2014).

Kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Kewarganegaraan digital mencakup kemampuan berkomunikasi secara etis, menjaga keamanan data, menghargai hak orang lain, memverifikasi informasi, memahami konsekuensi jejak digital, serta menggunakan teknologi untuk kepentingan publik. Choi et al. (2017) menekankan bahwa kewarganegaraan digital berhubungan dengan partisipasi, literasi kritis, keterampilan teknis, dan tanggung jawab sosial. Jones dan Mitchell (2016) juga menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital pada anak muda perlu diukur melalui perilaku menghormati orang lain secara daring dan partisipasi dalam aktivitas sosial digital.

Masyarakat maya dapat memperkaya pendidikan nilai melalui empat cara. Pertama, ruang digital memperluas akses terhadap informasi dan perspektif yang beragam sehingga peserta didik dapat belajar melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Kedua, ruang digital menyediakan sarana dialog dan kolaborasi lintas komunitas sehingga peserta didik dapat mengalami praktik deliberasi publik. Ketiga, ruang digital memungkinkan dokumentasi dan diseminasi praktik baik, seperti kampanye anti perundungan, gerakan peduli lingkungan, donasi sosial, dan edukasi toleransi. Keempat, ruang digital memberi peluang kepada peserta didik untuk memproduksi konten kewarganegaraan, bukan hanya menjadi konsumen informasi (Kahne et al., 2012; Mihailidis & Thevenin, 2013; Vromen et al., 2015).

Namun, masyarakat maya juga membawa risiko yang harus diantisipasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Arus informasi yang cepat dapat membuat peserta didik mudah menerima kabar tanpa verifikasi. Algoritma dapat memperkuat ruang gema dan polarisasi. Budaya komentar dapat mendorong ujaran kebencian, perundungan siber, dan normalisasi kekerasan verbal. Aktivisme digital juga dapat berubah menjadi partisipasi dangkal apabila tidak diikuti refleksi dan tindakan nyata. Risiko tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nilai di ruang digital tidak cukup mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi perlu membentuk nalar etik, literasi kritis, empati digital, dan tanggung jawab atas konsekuensi komunikasi (Ohler, 2011; Rheingold, 2012; Selwyn, 2010).

Tabel 2. Perbandingan Peran Masyarakat Riil dan Masyarakat Maya

Aspek	Masyarakat Riil	Masyarakat Maya	Implikasi Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang belajar nilai	Keluarga, sekolah, komunitas, organisasi warga, tempat ibadah.	Media sosial, forum daring, komunitas digital, aplikasi percakapan.	Pembelajaran perlu menghubungkan pengalaman langsung dan pengalaman digital.
Bentuk partisipasi	Musyawarah, gotong royong, kerja bakti, proyek sosial, organisasi.	Kampanye digital, diskusi publik daring, produksi konten, petisi, kolaborasi daring.	Partisipasi warga perlu dilatih secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.
Kekuatan utama	Keteladanan, pembiasaan, empati	Akses informasi, jejaring luas, kecepatan diseminasi, kreativitas konten.	Sinergi keduanya memperkuat

	langsung, kontrol sosial.		pembentukan karakter warga negara.
Risiko utama	Eksklusivitas kelompok, tekanan sosial, tradisi yang tidak reflektif.	Disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, jejak digital negatif.	Pendidikan nilai perlu memuat klarifikasi nilai, literasi informasi, dan etika digital.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Sinergi Masyarakat Riil dan Maya dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Sinergi masyarakat riil dan masyarakat maya menjadi kunci agar pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan relevan dengan kehidupan warga saat ini. Masyarakat riil memberikan kedalaman pengalaman, relasi emosional, pembiasaan, keteladanan, dan kontrol sosial. Masyarakat maya memberikan keluasan akses, jejaring, kecepatan informasi, ruang ekspresi, dan peluang partisipasi lintas batas. Keduanya perlu dihubungkan agar nilai yang dipraktikkan di lingkungan nyata dapat diperkuat melalui media digital, dan nilai yang dipelajari di ruang digital dapat diwujudkan melalui tindakan sosial yang konkret.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sinergi tersebut dapat dilakukan melalui proyek kewargaan hibrida. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah riil di lingkungan, seperti sampah, intoleransi, pelanggaran tata tertib, perundungan, rendahnya kepedulian sosial, atau rendahnya literasi informasi. Setelah itu, peserta didik melakukan observasi lapangan, wawancara warga, diskusi kelas, kajian aturan, dan musyawarah solusi. Hasilnya dapat dikembangkan menjadi kampanye digital, poster edukatif, video pendek, infografis, atau forum diskusi daring. Proses ini menghubungkan pengalaman langsung dengan produksi pesan publik di ruang digital.

Sinergi juga dapat dilakukan melalui penguatan komunitas belajar. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua, karang taruna, perpustakaan, organisasi masyarakat, media lokal, dan komunitas digital edukatif untuk membangun budaya kewargaan. Orang tua dapat mendampingi perilaku digital anak di rumah. Guru dapat merancang pembelajaran reflektif tentang etika digital. Komunitas lokal dapat menyediakan persoalan nyata sebagai bahan proyek. Komunitas digital dapat menjadi ruang publikasi, kolaborasi, dan apresiasi. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi proses kolektif yang melibatkan banyak aktor (Cogan & Derricott, 1998; Kerr, 1999; Winataputra, 2015).

Rerangka Konseptual Ekosistem Sosial Hibrida



Sumber: Diolah penulis, 2026

Sumber: Diolah penulis, 2026

Gambar 1. Rerangka Konseptual Pendidikan Nilai dan Kewarganegaraan dalam Ekosistem Sosial Hibrida

Tabel 3. Model Operasional Integrasi Masyarakat Riil dan Maya dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Tahap Model Hibrida	Aktivitas Utama	Aktor yang Terlibat	Kompetensi Kewargaan yang Dikuatkan
Identifikasi isu	Mengamati masalah di sekolah atau masyarakat dan membaca isu terkait di ruang digital.	Peserta didik, guru, warga, orang tua.	Kepekaan sosial dan literasi informasi.
Klarifikasi nilai	Mendiskusikan nilai Pancasila, norma, hak, kewajiban, dan dampak moral dari isu.	Guru, peserta didik, narasumber komunitas.	Nalar moral, empati, dan tanggung jawab.
Aksi riil	Melaksanakan kegiatan sosial, kampanye langsung, gotong royong, atau advokasi lingkungan.	Sekolah, komunitas lokal, organisasi warga.	Partisipasi, kolaborasi, dan kepemimpinan.
Aksi digital	Membuat konten edukatif, infografis, video, artikel pendek, atau kampanye media sosial.	Peserta didik, guru, komunitas digital.	Literasi media, etika digital, dan komunikasi publik.
Refleksi dan evaluasi	Menilai dampak kegiatan, proses kerja sama, kualitas konten, dan perubahan sikap.	Guru, peserta didik, orang tua, komunitas.	Refleksi kewargaan dan komitmen berkelanjutan.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan pertama adalah kesenjangan literasi digital antara peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat. Peserta didik mungkin lebih akrab dengan platform digital, tetapi belum tentu memiliki literasi kritis dan etika digital yang memadai. Orang tua dan guru sering kali memiliki perhatian moral, tetapi tidak selalu memahami pola interaksi digital anak. Kesenjangan ini dapat mengurangi efektivitas pendidikan nilai jika sekolah dan keluarga tidak membangun komunikasi yang terbuka mengenai penggunaan teknologi.

Tantangan kedua adalah fragmentasi sumber nilai. Peserta didik menerima nilai dari keluarga, sekolah, agama, budaya lokal, teman sebaya, media sosial, selebritas digital, dan komunitas daring. Tidak semua sumber nilai tersebut sejalan. Sebagian konten digital dapat memperkuat toleransi, solidaritas, dan kreativitas, tetapi sebagian lain dapat menormalisasi kekerasan verbal, konsumerisme, diskriminasi, dan sinisme terhadap politik. Pendidikan Kewarganegaraan perlu membantu peserta didik melakukan klarifikasi nilai, menimbang alasan moral, dan mengambil posisi yang bertanggung jawab (Fraenkel, 1977; Haste, 2004).

Tantangan ketiga adalah lemahnya jembatan antara partisipasi digital dan tindakan sosial nyata. Banyak peserta didik aktif menyukai, membagikan, atau mengomentari isu sosial, tetapi belum tentu terlibat dalam tindakan konkret. Di sisi lain, banyak kegiatan sosial di masyarakat belum terdokumentasi dan belum dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran digital. Pendidikan Kewarganegaraan perlu menjembatani keduanya melalui pembelajaran berbasis proyek, portofolio digital, refleksi pengalaman, dan aksi komunitas.

Strategi penguatan dapat dilakukan melalui lima arah. Pertama, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu memasukkan isu digital sebagai konteks nilai, bukan sekadar materi tambahan. Kedua, sekolah perlu mengembangkan budaya digital yang etis melalui aturan penggunaan gawai, pendampingan media sosial, dan diskusi kasus nyata. Ketiga, guru perlu mengintegrasikan literasi informasi, verifikasi sumber, etika komentar, keamanan data, dan tanggung jawab jejak digital ke dalam pembelajaran. Keempat, sekolah

perlu membangun kemitraan dengan keluarga dan masyarakat agar nilai yang diajarkan di kelas mendapat dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, peserta didik perlu diberi kesempatan mempraktikkan partisipasi kewargaan melalui proyek hibrida yang menggabungkan observasi lapangan, refleksi moral, produksi konten, dan aksi sosial.

Model penguatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus membentuk warga negara yang tidak hanya patuh, tetapi juga kritis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam masyarakat digital, kualitas warga negara yang baik tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari kemampuan menjaga martabat orang lain dalam komunikasi daring, menghindari penyebaran informasi salah, melindungi data pribadi, menghargai keberagaman, dan menggunakan media digital untuk kepentingan publik. Pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan perlu bergerak dari pendekatan transfer nilai menuju pendekatan ekosistem yang menghubungkan pengetahuan, pengalaman, refleksi, dan partisipasi (Biesta, 2009; Choi, 2016; Westheimer & Kahne, 2004).

KESIMPULAN

Pendidikan nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam ekosistem sosial hibrida menuntut cara pandang baru bahwa pembentukan warga negara tidak hanya berlangsung di ruang kelas dan masyarakat riil, tetapi juga di ruang maya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat riil berperan sebagai ruang pembiasaan, keteladanan, kontrol sosial, empati langsung, dan praktik kewargaan konkret. Masyarakat maya berperan sebagai ruang akses informasi, dialog publik, jejaring partisipasi, produksi konten, dan pembelajaran kewarganegaraan digital. Keduanya tidak dapat dipertentangkan karena nilai yang dipelajari di ruang riil dapat diperkuat melalui ruang digital, sedangkan nilai yang berkembang di ruang digital perlu diuji melalui tindakan sosial yang nyata.

Sinergi masyarakat riil dan maya perlu dirancang melalui model Pendidikan Kewarganegaraan hibrida yang menghubungkan keluarga, sekolah, komunitas, dan platform digital. Model tersebut dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek kewargaan, klarifikasi nilai, literasi media, etika digital, kampanye sosial, aksi komunitas, serta refleksi atas pengalaman. Dengan cara ini, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami konsep nilai dan norma, tetapi juga warga negara yang mampu mempraktikkan tanggung jawab moral, kepedulian sosial, partisipasi demokratis, komunikasi etis, dan literasi digital. Artikel ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan nilai pada era digital harus bergerak dari pendekatan yang berpusat pada sekolah menuju pendekatan ekosistem sosial hibrida agar pembentukan karakter warga negara dapat berlangsung secara utuh, kontekstual, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495-518. <https://doi.org/10.1080/03057240601012204>
- APJII. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Bennett, W. L. (2008). Changing citizenship in the digital age. In W. L. Bennett (Ed.), *Civic life online: Learning how digital media can engage youth* (pp. 1-24). MIT Press.
- Bennett, W. L., Wells, C., & Rank, A. (2009). Young citizens and civic learning: Two paradigms of citizenship in the digital age. *Citizenship Studies*, 13(2), 105-120. <https://doi.org/10.1080/13621020902731116>

- Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: On the need to reconnect with the question of purpose in education. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 33-46. <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9>
- BPSDM Komdigi. (2025). *Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025*. Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565-607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100-112. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002>
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (Eds.). (1998). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Kogan Page.
- DataReportal. (2026). *Digital 2026: Indonesia*. Kepios.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Fraenkel, J. R. (1977). *How to teach about values: An analytic approach*. Prentice-Hall.
- Haste, H. (2004). Constructing the citizen. *Political Psychology*, 25(3), 413-439. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00378.x>
- Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite indicator. *Social Indicators Research*, 90(3), 459-488. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9271-2>
- Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2006). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. MacArthur Foundation.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063-2079. <https://doi.org/10.1177/1461444815577797>
- Kahne, J., Lee, N.-J., & Feezell, J. T. (2012). Digital media literacy education and online civic and political participation. *International Journal of Communication*, 6, 1-24.
- Kepios. (2026). *Digital 2026: Indonesia*. DataReportal.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. Qualifications and Curriculum Authority.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasi living values education*. Refika Aditama.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The influence of living values education-based civic education textbook on student's character formation. *International Journal of Instruction*, 11(1), 395-410. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.11127a>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1611-1622. <https://doi.org/10.1177/0002764213489015>
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.

- Ohler, J. (2011). Digital citizenship means character education for the digital age. *Kappa Delta Pi Record*, 47(sup1), 25-27. <https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516720>
- Rheingold, H. (2012). *Net smart: How to thrive online*. MIT Press.
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Sapriya. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Remaja Rosdakarya.
- Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: Notes towards the critical study of educational technology. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(1), 65-73. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00338.x>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torney-Purta, J. (2002). The school's role in developing civic engagement: A study of adolescents in twenty-eight countries. *Applied Developmental Science*, 6(4), 203-212. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604_7
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404-428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Vromen, A., Xenos, M. A., & Loader, B. D. (2015). Young people, social media and connective action: From organisational maintenance to everyday political talk. *Journal of Youth Studies*, 18(1), 80-100. <https://doi.org/10.1080/13676261.2014.933198>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the good citizen: Political choices and pedagogical goals. *PS: Political Science & Politics*, 37(2), 241-247. <https://doi.org/10.1017/S1049096504004160>
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, strategi, dan penilaian*. Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*. Universitas Terbuka.
- Zuchdi, D., Prasetya, Z. K., & Masruri, M. S. (2012). *Pendidikan karakter: Konsep dasar dan implementasi di perguruan tinggi*. UNY Press.